

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengangguran terbuka merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja yang ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah mampu menciptakan pertumbuhan dan peningkatan sumber daya manusia. Pertumbuhan penduduk juga mempengaruhi adanya tingkat pengangguran karena dengan meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk, maka tenaga kerja dan angkatan kerja juga ikut meningkat. Pengangguran memiliki hubungan positif terhadap kemiskinan. Ketika mengatasi permasalahan kemiskinan, setiap individu yang menganggur tidak akan memiliki pendapatan mengakibatkan tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Hal ini membutuhkan lapangan pekerjaan dan umumnya di negara berkembang. Salah satu komponen yang menentukan kemakmuran masyarakat adalah pendapatan. Pendapatan masyarakat dikatakan maksimum, jika terjadi penggunaan tenaga kerja secara penuh atau full employment. Pengangguran adalah individu yang dapat di kategorikan angkatan kerja (15 tahun sampai 64 tahun) yang tidak memiliki pekerjaan dan dalam mencaari pekerjaan.

Pengangguran memang kini belum bisa terlepas dari salah satu bagi

bagian masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang di dunia, termasuk bangsa Indonesia. Pengangguran dinegeri ini, masih menjadi masalah aktual yang menjadi bahasan panjang sejak orde baru tumbang dan Indonesia dicap sebagai negara yang cukup terganggu perkembangannya. Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia sebagai negara berkembang harus melakukan banyak perubahan untuk mendukung pembangunan nasional. Hal tersebut bertujuan agar terciptanya stabilitas nasional, iklim investasi yang baik, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga dapat menekan angka pengangguran di Indonesia. Pembangunan ekonomi sebuah negara dapat dilihat keberhasilannya dari beberapa indikator perekonomian, satu diantaranya adalah tingkat pengangguran. Berdasarkan tingkat pengangguran dapat dilihat kondisi suatu negara apakah perekonomiannya berkembang atau lambat dan atau bahkan mengalami kemunduran. Pengangguran sendiri merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja dan ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut. Apabila pengangguran tersebut tidak segera diatasi maka dapat menimbulkan kerawanan sosial dan berpotensi mengakibatkan kemiskinan. Berbagai kebijakan dibuat di setiap pemerintahan untuk menanggulangi masalah pengangguran, kebijakan yang didesain secara sentralistik oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini dimentori oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), merancang berbagai program untuk dapat

mengatasi masalah pengangguran.

Pengangguran merupakan masalah yang selalu dihadapi dalam perekonomian muncul karena adanya ketidaksesuaian antara permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja. Masalah pengangguran ini sangat penting karena adanya pengangguran dapat menimbulkan masalah sosial termasuk masalah sosial dengan motif ekonomi. Jalannya perekonomian tidak terlepas dari adanya masalah-masalah yang menjadi pengaruh naik turunnya hasil sebuah perekonomian. Meskipun tidak hanya negara berkembang saja yang mengalami masalah pengangguran, akan tetapi salah satu karakteristik umum negara berkembang adalah angka pengangguran terbuka maupun terselubung yang tinggi. Pengangguran terbuka mereka yang ingin bekerja, sedang berusaha mendapatkan pekerjaan tetapi belum berhasil mendapatkannya. Negara manapun di dunia ini baik yang dikategorikan negara maju maupun negara sedang berkembang senantiasa menghadapi masalah pengangguran, perbedaannya negara berkembang tidak mampu memberikan tunjangan kepada warga negaranya yang menganggur, sedangkan negara maju mampu memberikan jaminan itu. Permasalahan pengangguran memang sangat kompleks untuk dibahas dan merupakan isu penting, karena dapat dikaitkan dengan beberapa indikator-indikator. Indikator-indikator ekonomi yang mempengaruhi tingkat pengangguran antara lain pertumbuhan ekonomi negara bersangkutan besaran upah yang berlaku. Apabila disuatu negara pertumbuhan ekonominya mengalami kenaikan, diharapkan akan berpengaruh pada

penurunan jumlah pengangguran hal ini diikuti dengan tingkat upah. Dalam keadaan seperti ini sangat sulit untuk mencapai titik titik keseimbangan untuk sekedar mempertahankan profitabilitas. Dengan jatuhnya sektor riil banyak tenaga kerja yang jadi korban dengan menimbulkan lonjakan angka pengangguran yang sangat tajam telah menumbangkan sektor riil yang mengakibatkan dampak pengangguran meluas. Pengangguran mempunyai kecenderungan untuk meningkat hal ini menjadi tantangan besar bagi indicator pembangunan yang berhasil salah satunya mampu mengurangi pengangguran secara signifikan apalagi di era globalisasi persaingan tenaga kerja semakin ketat. Pengangguran umumnya disebabkan menyerapnya informasi dimana para pencari kerja tidak memiliki akses untuk mencari informasi tentang perusahaan yang kekurangan tenaga kerja dan kurangnya keahlian yang dimiliki oleh pencari kerja serta kurangnya perhatian pemerintah terhadap peningkatan softskill pencari kerja menjadi penyebab tingginya angka pengangguran. Apabila hal tersebut dibiarkan maka pengangguran dapat menjadi masalah sosial seperti timbulnya kemiskinan,tingginya angka kejahatan dan masalah sosial lainnya.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Penganggur dan Presentase Pengangguran Jawa Timur
2012-2021

Tahun	Jumlah Penduduk Pengangguran (Jiwa)	Presentase Pengangguran (%)
2012	38.106.590	4,09
2013	38.847.561	4,30
2014	38.610.202	4,19
2015	38.847.561	4,47
2016	39.075.152	4,21
2017	39.292.971	4,00
2018	39.500.851	3,91
2019	39.698.631	3,82
2020	40.665.696	5,84
2021	40.878.800	5,74

Sumber: BPS Jawa Timur

Berdasarkan data yang ditunjukkan tabel 1, dapat terlihat bahwa upaya yang dilakukan pemerintah Jawa Timur dalam rangka menanggulangi pengangguran menunjukkan hasil yang cukup baik. Jumlah penduduk pada tahun 2012 sebesar 38.106.590 jiwa dengan presentase pengangguran sebesar 4,09. Kemudian pada tahun 2013 jumlah penduduk sebesar 38.847.561 jiwa dengan presentase pengangguran sebesar 4,30. Jumlah penduduk pengangguran pada tahun 2015 sebesar 38.847.561 jiwa mengalami kenaikan sebesar 1.457.763 dari tahun sebelumnya yang sebesar 38.610.202. Presentase penduduk pengangguran pada tahun 2015 sebesar 4,47 persen dari tahun sebelumnya naik 8,66 persen dari tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah penduduk pengangguran sebesar 31 658 211 jiwa dan peningkatan presentase pengangguran sebanyak 0,99% dari tahun sebelumnya.

Menurut BPS pengangguran dapat diukur menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Pendekatan ini memandang sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan yang diukur dari segi sisi pengeluaran. Salah satu kebijakan yang berpengaruh terhadap pengangguran adalah suatu upaya yang dilakukan manusia untuk memenuhi standar kebutuhan hidup masyarakat diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja, sehingga dapat berkurangnya pengangguran di Jawa Timur.

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk (Jiwa) di Jawa Timur

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
2012	38.106.590
2013	38.847.561
2014	38.610.202
2015	38.847.561
2016	39.075.152
2017	39.292.971
2018	39.500.851
2019	39.698.631
2020	40.665.696
2021	40.878.800

Jumlah penduduk juga mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka karena dengan meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk maka jumlah tenaga kerja ikut meningkat. Angkatan kerja membutuhkan lapangan pekerjaan di negara berkembang oleh karena itu semua angkatan kerja bisa mendapat pekerjaan dan akhirnya menganggur selama lima tahun terakhir jumlah penduduk paling tinggi terjadi pada tahun 2021 sebanyak 40.878.800 jiwa.

Penduduk usia kerja termasuk kategori bukan angkatan kerja adalah mereka sebagian besar waktunya digunakan untuk kegiatan lainya. Peningkatan jumlah penduduk memberikan warna positif bagi penyiapan kualitas ketenaga kerjaan di Jawa Timur dimasa mendatang yang signifikan dalam penyiapan SDM menjadi tenaga kerja yang siap masuk dalam pasar khususnya sebagai pekerja mandiri. Secara umum penduduk yang berdomisili bahwa jumlah menunjukkan total manusia yang ditempati suatu wilayah pada jangka tertentu.²

Tabel 1.3

Produk Domestik Bruto dan Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan Jawa Timur 2014-2021

Tahun	PDRB (Miliar Rupiah)	Laju Pertumbuhan PDRB (Persen)
2012	1.124.465	6,64
2013	1.192.790	6,08
2014	1.262.685	5,86
2015	1.331.376	5,44
2016	1.405.564	5,57
2017	1.482.300	5,46
2018	1.563.442	5,47
2019	1.649.769	5,52
2020	1.610.420	-2,39
2021	1.669.117	3,57

Sumber: BPS, berbagai sensus, survey, dan sumber lain

Berdasarkan tabel 3 diatas, ketahu bahwa pertumbuhan PDRB Jawa Timur pada Tahun 2012 sebesar 1.124.465 dengan jumlah laju pertumbuhan PDRB sebesar 6,64. Kemudian pada tahun 2013 sebesar 1.192.790 dengan

² M.Amirul Mukminin, "Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka" Di Provinsi Jawa Barat, Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol 1, No 3, 2017, hlm 12.

jumlah laju pertumbuhan PDRB sebesar 6,08. Dapat dilihat bahwa pertumbuhan PDRB Jawa Timur pada tahun 2014 hingga 2019 selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 5,49%. Namun, pada tahun 2021 terjadi kenaikan jumlah PDRB sebesar 1.279.537 menjadi 1.669.117 dari yang sebelumnya sebesar 1.610.420 pada tahun 2020. Penurunan jumlah PDRB ini juga menunjukkan terjadi penurunan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 3,57%.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang terjadi secara cepat, belum tentu menunjukkan keberhasilan pembangunan ekonomi daerah tersebut. Justru pertumbuhan ekonomi yang cepat akan berdampak terhadap ketimpangan dan distribusi pendapatan, karena sejatinya pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan pemerataan. Akan ada semacam trade off antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan pemerataan pendapatan dalam suatu pembangunan ekonomi. Ketika pembangunan ekonomi lebih ditujukan untuk pemerataan pendapatan maka pertumbuhan ekonomi akan membutuhkan waktu yang relatif lama untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi. Begitu pula, sebaliknya jika pembangunan lebih difokuskan untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi maka akan semakin besar kemungkinan terjadinya ketimpangan dalam distribusi pendapatan.³

³ David Albarqi, "Kajian Tingkat Pengangguran Terbuka Di Jawa Timur", *Jurnal Ilmiah Fakultas Bisnis, Vol 2, No 1, 2016*, hlm 7.

Tabel 1.4
Upah Minimum Regional Jawa Timur 2012-2021

Tahun	Upah Minimum
2012	74.500,00
2013	86.625,00
2014	10.000,00
2015	10.000,00
2016	115.000,00
2017	1.388.000,00
2018	1.508.895,00
2019	1.630.059,00
2020	1.768.777,00
2021	1.868.000,00

Sumber: BPS Jawa Timur

Upah minimum diyakini sebagai salah satu kebijakan yang efektif untuk menekan angka kemiskinan. Upah minimum dapat mengurangi ketimpangan karena akan mendistribusi pendapatan dengan menurunkan keuntungan yang diperoleh perusahaan dan meningkatkan upah pekerja terendah. Oleh karena itu, upah minimum dapat menciptakan distribusi upah yang adil sehingga memiliki kenaikan pendapatan dan berdampak pada mengurangi pengangguran dan ketimpangan pendapatan.⁴

Salah satu faktor penting untuk dapat terlepas dari kemiskinan yaitu pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat dari PDRB. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian suatu daerah dalam suatu periode. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada

⁴ Sari Nurmalisa Sungkar, "Pengaruh Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* Vol 3, No. 2, 2015. Hal 12.

suatu daerah tertentu dan dapat dikatakan juga sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi (BPS,2016). Menurut Todaro, meskipun pertumbuhan ekonomi tidak memberi jawaban secara otomatis terhadap berbagai macam permasalahan ekonomi, namun pertumbuhan ekonomi tetap menjadi unsur penting dalam pengentasan pengangguran.

B. Identifikasi Masalah

1. Terjadi peningkatan dan jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur Periode 2012-2021, dimana Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah penduduk pengangguran terbanyak di antara provinsi lain di pulau Jawa.
2. Kualitas SDM Jawa Timur yang ditunjukkan oleh angka yang cukup tinggi, jika dibandingkan dengan provinsi lain yang berada di pulau Jawa.
3. Perbedaan hasil penelitian dari beberapa penelitian terdahulu.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh jumlah penduduk yang signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jawa Timur Periode 2012-2021.
2. Apakah terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi yang signifikan terhadap pengangguran terbuka Provinsi Jawa Timur Periode 2012-2021.
3. Apakah terdapat pengaruh upah minimum yang signifikan terhadap pengangguran terbuka Provinsi Jawa Timur Periode 2012-2021.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemetaan latar belakang diatas, tujuan dilakukanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap pengangguran terbuka Provinsi Jawa Timur Periode 2012-2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran terbuka Provinsi Jawa Timur Periode 2012-2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap pengangguran terbuka Provinsi Jawa Timur Periode 2012-2021.

E. Manfaat Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap dunia akademisi, masyarkat umum, para stekholder dan pribadi penulis:

1. Secara Teoritis

Hasil dari dilakukanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis atau akademis sebagai sumber informasi tambahan dan membantu perkembangan keilmjuan khususnya dalam bidang studi kajian ilmu ekonomi mengenai pengaruh Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah minimum terhadap Pengangguran.

2. Secara Praktis

a. Bagi pengambilan kebijakan

Hasil dari penelitian ini mampu memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran, sehingga dapat dijadikan sarana evaluasi dan memahami lebih jauh untuk mengambil kebijakan selanjutnya guna menyelesaikan permasalahan ini.

b. Bagi pihak akademis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa tambahan kepustakaan atau referensi dibidang keilmuan ekonomi syariah, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

c. Bagi penelitian selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya guna menambahkan pengetahuan khususnya bagi pihak yang tertarik dengan masalah yang sama.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dilakukan pada 38 Kota/Kabupaten yang ada di Jawa Timur. penelitian ini mengkaji tentang pengaruh jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan upah minimum terhadap pengangguran terbuka Provinsi Jawa Timur Periode 2012-2021. Dalam penelitian ini, data yang digunakan yaitu data sekunder yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS)

dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Namun pada penelitian ini, penulis terbatas pada variabel jumlah penduduk, upah minimum, pertumbuhan ekonomi serta pengangguran terbuka sebagai variabel terikat, data yang digunakan yaitu data sekunder yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS).

G. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dalam sebuah penelitian diperlukan agar tidak terjadi perbedaan dalam memahami skripsi ini. Penegasan istilah yang berkaitan dengan judul ini adalah sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

- a. Jumlah penduduk merupakan pertambahan penduduk yang ada di Provinsi Jawa Timur.
- b. Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa diproduksi dalam masyarakat terus bertambah.
- c. Upah minimum merupakan besaran upah terendah yang diatur oleh pemerintah untuk dijadikan standar oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja/buruh yang bekerja diperusahaanya.
- d. Pengangguran terbuka merupakan persentase sejumlah angkatan kerja yang ada di Provinsi Jawa Timur.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi variabel secara nyata dan riil dalam lingkup objek penelitian. Secara operasional penelitian ini dimaksudkan untuk menguji bagaimana pengaruh jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan upah minimum pada pengangguran yang terjadi di Provinsi yang ada di Jawa Timur.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika dalam penulisan skripsi sangatlah dibutuhkan dalam melakukan penelitian dengan tujuan guna memudahkan pembaca dalam memahami pola penelitian. Dari penelitian ini akan dibagi menjadi 3 bagian yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.

1. Bagian awal, terdiri dari : halaman sampul depan; halama judul; persembahan; kata pengantar; daftar isi; daftar gambar; daftar tabel; daftar lampiran; transliterasi; dan abstrak.
2. Bagian utama, terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari: latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Terdiri dari: teori yang membahas variabel/ sub variabel pertama, teori yang membahas variabel/ sub variabel kedua, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Terdiri dari: pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data, variabel penelitian, skala penelitian, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Terdiri dari: hasil penelitian (yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis).

BAB V : PEMBAHASAN

Berisi pembahasan data penelitian dan hasil analisis data.

BAB IV : PENUTUP

Terdiri dari: kesimpulan, dan saran atau rekomendasi bagian akhir terdiri dari: daftar pustaka, lampiran lampiran.